

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WONOGIRI 2018



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018

No. Publikasi : 33120.1930
Katalog BPS : 4102004.3312
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 47 Halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah : Djulfikar Rizky, M.Si
Penanggungjawab : Kurniawan Dwi Nugroho, SST
Editor : Kurniawan Dwi Nugroho, SST
Penulis : Kurniawan Dedy Cahyono, SST, SE, M.Si
Retabulasi : Kurniawan Dedy Cahyono, SST, SE, M.Si
Desain Cover : Kurniawan Dedy Cahyono, SST, SE, M.Si

<https://wonogirikab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018 merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Wonogiri yang menyajikan data mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Wonogiri dari waktu ke waktu. Data utama yang digunakan bersumber dari publikasi maupun tabulasi hasil Sensus/Survei BPS diantaranya Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional serta Survei Angkatan Kerja Nasional.

Publikasi ini menyajikan aspek-aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan tingkat kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, kami sampaikan penghargaan terima kasih. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Wonogiri, Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wonogiri

Djulfikar Rizky, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
1. Kependudukan	1
2. Kesehatan dan Gizi	11
3. Pendidikan	15
4. Ketenagakerjaan	23
5. Pola Konsumsi	31
6. Perumahan dan Lingkungan	35
7. Kemiskinan	39
8. Sosial Lainnya	43
9. Kesimpulan	45
Daftar Pustaka	47

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri, 2014-2018	2
1.2	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018	6
1.3	Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Wonogiri, 2017-2018	7
1.4	Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Wonogiri, 2017 - 2018	8
1.5	Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB di Kabupaten Wonogiri, 2017 – 2018	8
1.6	Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/ Cara KB yang Sedang Dipakai di Kabupaten Wonogiri, 2017 – 2018	9

KESEHATAN DAN GIZI

2.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Wonogiri , 2014-2018	12
2.2	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2017-2018.....	12
2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Tinggal dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wonogiri, 2017-2018	13
2.4	Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Tinggal dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017-2018.....	14

PENDIDIKAN

3.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Wonogiri, 2018.....	16
3.2	Angka Melek Huruf Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018	16

3.3	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonogiri, 2016-2018.....	17
3.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018.....	18
3.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018.....	19
3.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018.....	20
3.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018.....	21

KETENAGAKERJAAN

4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 - 2018	25
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2017-2018	26
4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2018	27
4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tempat Tinggal dan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Wonogiri, 2018	28
4.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2013 dan 2015	52

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018	32
5.2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wonogiri, 2018.....	33
5.3	Rata-rata Pengeluaran Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wonogiri, 2018.....	33
5.4	Rata-rata Pengeluaran Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Tempat Tinggal di Kabupaten Wonogiri, 2018.....	34

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan,	
-----	---	--

2016-2018	35
6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016-2018	37
6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Pengusahaan Bangunan Tempat Tinggal, 2016-2018	37

KEMISKINAN

7.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri, 2016-2018	39
---	----

SOSIAL LAINNYA

8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018	43
8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2018	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Persentase Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kecamatan, 2018	4
1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kecamatan, 2018 ...	5

<https://wonogirikab.bps.go.id>

Kependudukan



Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk berperan ganda bagi perekonomian yaitu sebagai subyek sekaligus obyek bagi pembangunan. Penduduk sebagai motor penggerak, pemikir, perencana sekaligus pelaksana dari berbagai program pembangunan. Sebaliknya, seluruh sasaran program pembangunan pada akhirnya akan terkait dan tertuju kepada maslahat dan kesejahteraan penduduk.

Masalah kependudukan saat ini masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi namun di sisi lain dapat menjadi beban dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk diantaranya kelaparan, munculnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia hingga meningkatnya kriminalitas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk merupakan permasalahan yang sering muncul di negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk. Salah satu permasalahan yang timbul saat tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas penduduk yaitu bertambahnya jumlah pengangguran karena kualifikasi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan dunia kerja.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035, jumlah penduduk Wonogiri tahun 2018 mencapai 957,1 ribu jiwa atau meningkat sekitar 2,4 ribu jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 954,7 ribu jiwa. Walaupun mengalami kenaikan jumlah penduduk tiap tahun, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Wonogiri sebesar 0,35 persen, mengalami penurunan hingga sebesar 0,25

persen di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk menunjukkan adanya keberhasilan. Meskipun demikian, masih tetap diperlukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyediaan berbagai fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan papan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Persen)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	945,7	0,35	94,60
2015	949,0	0,35	94,59
2016	952,0	0,31	94,57
2017	954,7	0,29	94,56
2018	957,1	0,25	94,54

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2010-2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Wonogiri lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 sebesar 94,54. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 95 penduduk laki-laki.

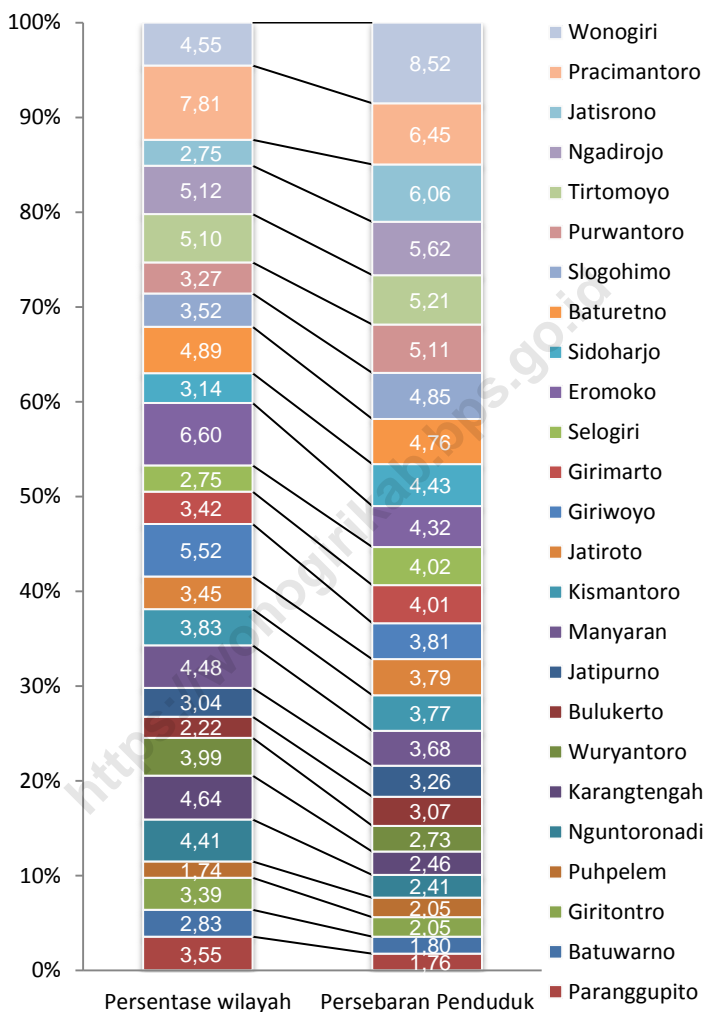
Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Beberapa wilayah mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, namun di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Gambar 1.1 memberikan gambaran persebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Secara umum, ketimpangan persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri tidak terlalu kentara. Meskipun demikian, tergambar adanya konsentrasi tempat tinggal penduduk yang cenderung mendekati pusat perekonomian. Sebagai gambaran, Kecamatan Wonogiri dengan luas wilayah 4,55 persen dari wilayah total Wonogiri namun ditinggali oleh 8,52 persen penduduk. Kemudian Kecamatan Jatisrono dengan luas wilayah hanya 2,75 persen namun dihuni oleh 6,06 persen jumlah penduduk Wonogiri.

Gambar 1.1 Persentase Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kecamatan, 2018

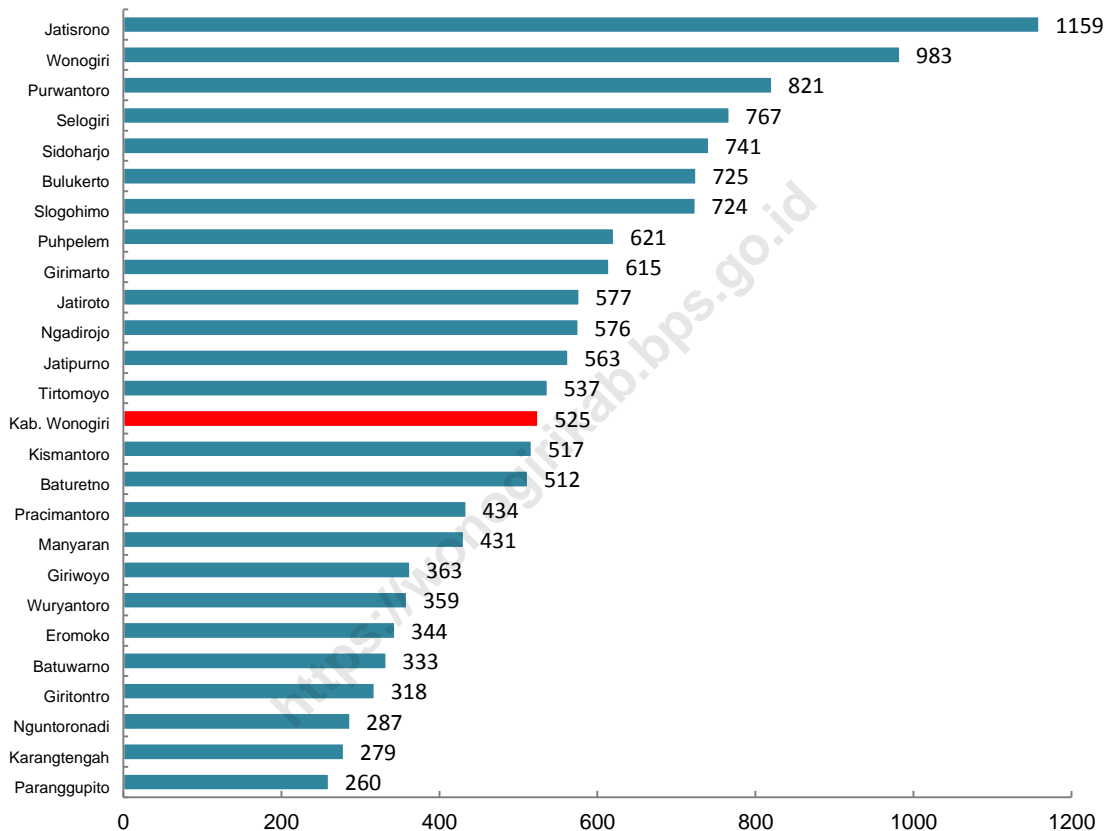


Sumber : Wonogiri Dalam Angka 2018, diolah

Kepadatan penduduk di Wonogiri tahun 2018 mencapai 525 jiwa per km². Terdapat 13 Kecamatan dengan kepadatan penduduk di atas rata-rata Kabupaten Wonogiri, dengan tiga kecamatan terpadat yaitu Jatisrono (1159 jiwa per km²), Wonogiri (983 jiwa per km²) dan Purwanto (821 jiwa per km²). Sedangkan wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Paranggupito (260 jiwa per km²), Karangtengah (279 jiwa per km²) dan Nguntoronadi (287 jiwa per km²).

Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Jatisrono dan Wonogiri menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut menjadi pilihan utama bagi para penduduk untuk tinggal. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih memperluas pembangunan infrastruktur sehingga menjadi daya tarik dan dapat mewujudkan persebaran dan kepadatan penduduk yang merata.

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kecamatan, 2018



Sumber : Wonogiri Dalam Angka 2018

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan atau rasio antara penduduk usia belum produktif (0 - 14 tahun) dan usia 65 tahun keatas dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Besarnya Angka Beban Ketergantungan menunjukkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum

produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2014-2018 angka beban ketergantungan Kabupaten Wonogiri berkisar 51 persen dengan kecenderungan menurun, namun kembali meningkat di tahun 2018 sebesar 51,49 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komposisi Penduduk (Persen)					
0-14 Tahun	21,00	20,66	20,32	20,00	19,69
15-64 Tahun	66,00	66,07	66,10	66,08	66,01
65 Tahun +	13,00	13,27	13,58	13,92	14,30
Angka Beban Ketergantungan (persen)	51,52	51,36	51,30	51,33	51,49

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, diolah

Meningkatnya angka beban ketergantungan lebih disebabkan oleh meningkatnya penduduk usia 65 tahun ke atas, sedangkan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) justru mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.2 juga menggambarkan bahwa struktur penduduk Wonogiri didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu mencapai 66,01 persen pada tahun 2018. Besarnya penduduk usia produktif di Wonogiri sangat potensial sebagai modal dasar dalam proses pembangunan.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu variabel antara yang berpengaruh langsung terhadap fertilitas. Pada saat perkawinan pertama, secara formal seorang wanita diasumsikan akan memasuki kehidupan seksual, yang berarti pula dimulainya masa menghadapi resiko melahirkan.

Semakin muda usia perkawinan pertama seorang wanita, maka masa reproduksinya juga semakin panjang.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 46,34 persen penduduk wanita di Kabupaten Wonogiri melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun, sedangkan pada usia 17-18 tahun sebanyak 23,98 persen. Persentase wanita yang melakukan pernikahan pada usia di bawah 17 tahun masih cukup tinggi yaitu 17,40 persen pada tahun 2018. Ini menjadi indikasi masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda pernikahan pada usia dini.

Tabel 1.3 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Wonogiri, 2017-2018

Tahun	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Jumlah
	<17	17 - 18	19 - 24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	20,15	23,67	44,11	12,06	100,00
2018	17,40	23,98	46,34	12,27	100,00

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017 dan 2018, BPS

Status Perkawinan

Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Wonogiri, 2017 - 2018

Status Perkawinan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belum Kawin	17,38	18,36
Kawin	64,28	65,77
Cerai Hidup	2,63	1,52
Cerai Mati	15,71	14,36
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017 dan 2018, BPS

Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar (65,77 persen) dari perempuan usia 10 tahun ke atas berstatus kawin, sekitar 18,36 berstatus belum kawin persen sedangkan yang berstatus cerai sebesar 15,88 persen yang terdiri dari 1,52 persen cerai hidup dan 14,36 persen cerai mati. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan wanita 10 tahun ke atas yang berstatus cerai, hal ini berdampak positif pada menurunnya angka ketergantungan wanita yang hidup sendiri kepada keluarganya yang lain.

Penggunaan Alat/Cara KB

Salah satu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan keluarga berencana, diharapkan jumlah kelahiran dan jarak antar kelahiran bisa lebih direncanakan. Salah satu cara dalam program tersebut adalah penggunaan alat kontrasepsi.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB di Kabupaten Wonogiri, 2017 – 2018

Pemakaian Alat KB	Persentase	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Sedang Menggunakan	60,12	59,58
Tidak Menggunakan Lagi	12,62	15,03
Tidak Pernah Menggunakan	27,26	25,39
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017 dan 2018, BPS

Tabel 1.5 memberikan informasi bahwa sekitar 60 persen wanita berstatus kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Wonogiri sedang menggunakan alat/cara KB, serta ada 12,62 persen tahun 2017

dan 15,03 persen tahun 2018 wanita usia 15-49 tahun yang tidak menggunakan alat/cara KB lagi dengan berbagai alasan. Sedangkan yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi sebesar 25,39 persen di tahun 2018, menurun dibanding tahun 2017 (27,26 persen).

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/ Cara KB yang Sedang Dipakai di Kabupaten Wonogiri, 2017 – 2018

Tahun	Alat/Cara KB							
	MOW/ Tubektomi	MOP/ Vasektomi	AKDR/ IUD/ Spiral	Sunti kan KB	Susuk KB	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Tradisional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2017	7,14	0,47	14,78	44,70	8,54	19,52	0,73	4,13
2018	4,83	0,19	8,97	45,98	4,66	24,83	5,13	5,42

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017 dan 2018, BPS

Alat kontrasepsi yang paling favorit digunakan di Kabupaten Wonogiri adalah suntikan KB. Sekitar 45 persen wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin menggunakan kontrasepsi ini. Dapat dimaklumi, dikarenakan suntik KB ini cenderung aman dan murah. Posisi kedua adalah pil KB, yaitu sebesar 24,83 persen pada tahun 2018. Penggunaan pil KB ini meningkat dibandingkan tahun 2017 (19,52 persen).

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaanya adalah MOP/Vasektomi, dengan persentase kurang dari 1 persen. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi permanen untuk wanita (MOW/Tubektomi) lebih besar yaitu mencapai 7,14 persen tahun 2017 dan 4,83 persen tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi pria dalam program KB. Penggunaan kondom/karet KB cukup rendah pada tahun 2017 yaitu hanya 0,73 persen. Namun penggunaannya meningkat menjadi

5,13 persen pada tahun 2018. Ketidaknyamanan saat berhubungan sering dikeluhkan bagi pasutri yang menggunakan kondom/karet KB.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

Kesehatan Dan Gizi



Pembangunan di bidang kesehatan merupakan investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah telah menetapkan empat prioritas dalam bidang kesehatan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pertama, menurunkan angka kematian ibu dan anak, kedua meningkatkan gizi masyarakat, ketiga mengendalikan penyakit infeksi dan tidak menular serta keempat mendorong gerakan masyarakat dan dokter keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah dirasakan manfaatnya oleh ratusan juta masyarakat Indonesia.

Disamping itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah ditempuh pemerintah diantaranya meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya, serta penyediaan fasilitas air minum bersih. Pemerintah juga melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku sehat.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat diantaranya dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik.

Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Wonogiri diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup yaitu 75,84 tahun (tahun 2014) menjadi lebih panjang usia mencapai 76,05 tahun pada tahun 2018. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan pengaruh dari beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat,

perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Wonogiri, 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH	75,84	75,86	75,88	76,00	76,05

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat yaitu angka kesakitan (morbiditas). Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Misalnya ibu rumah tangga yang tidak bisa memasak karena sakit kepala, anak sekolah yang ijin tidak masuk karena demam ataupun balita yang rewel karena batuk pilek. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2017-2018

Jenis Kelamin	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	11,65	10,27
Perempuan	11,64	11,26
Jumlah	11,65	10,78

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2017-2018

Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Wonogiri mencapai 10,78 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,65 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, angka kesakitan laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Wonogiri secara umum.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk. Jangkauan akses tidak hanya merujuk pada jarak fasilitas kesehatan yang tersedia (di daerah terpencil), tapi juga masalah keterjangkauan perihal biaya pengobatan, harga obat-obatan dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk untuk mendatangi fasilitas kesehatan antara lain jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta kultur dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Tinggal dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wonogiri, 2017-2018

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Pedesaan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit Pemerintah	21,49	13,27	6,40	6,58	10,03	8,74
Rumah Sakit Swasta	13,98	12,53	14,19	12,84	14,14	12,74
Praktek Dokter/Bidan	41,92	39,15	51,74	51,91	49,37	47,79
Klinik/Praktek Dokter Bersama	4,86	14,05	8,74	11,26	7,81	12,16
Puskesmas/Pustu	21,92	21,01	20,41	19,50	20,77	19,99
UKBM*	1,72	1,21	2,31	2,40	2,17	2,02
Praktek Tradisional/Alternatif	1,57	0,33	2,09	0,66	1,97	0,55
Lainnya	0,00	0,00	0,41	0,33	0,31	0,23

* *Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan*

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017-2018

Sebagian besar penduduk Wonogiri baik di perkotaan maupun perdesaan, lebih banyak berobat jalan di praktek dokter/bidan. Fasilitas kesehatan yang dipilih berikutnya adalah Puskesmas/Pustu dengan capaian sekitar 20 persen dari seluruh penduduk yang berobat jalan. Dipilihnya kedua fasilitas ini karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan di rumah sakit.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Tinggal dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017-2018

Penolong Proses Persalinan (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2017 (2)	2018 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (7)
Dokter Kandungan	20,33	44,23	39,17	34,04	34,80	36,52
Dokter Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidan	79,67	55,77	56,29	65,96	61,71	63,48
Perawat	0,00	0,00	4,54	0,00	3,49	0,00
Dukun beranak/paraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tidak Ada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017-2018

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan dan menyadarkan masyarakat tentang kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana proses persalinan terakhir perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Wonogiri baik di perkotaan maupun perdesaan seluruhnya ditolong oleh tenaga kesehatan dimana peran bidan mencapai 63,48 persen dan dokter kandungan sebesar 36,52 persen.

Pendidikan



Pendidikan merupakan salah satu pondasi utama kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Di tangan pendidikan bermunculan generasi unggul yang akan mengambil peran dalam setiap proses pembangunan. Pembangunan pendidikan akan memberikan *multiplier effect* pada pembangunan di seluruh bidang.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam menghadapi kehidupan. Pentingnya pendidikan ini, UUD 1945 telah mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan minimal sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang tinggi nilai agama dan budaya untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia.

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat yang berhasil dicapai selama periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator bidang pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), tingkat/jenjang pendidikan yang ditamatkan, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf berkorelasi positif dengan kemampuan sumber daya manusia di suatu wilayah. Kemampuan baca tulis memberikan peluang lebih besar dalam memasuki dunia kerja serta akses ke pendidikan lebih tinggi dan ilmu pengetahuan baru.

Seseorang dikatakan bisa membaca dan menulis jika seseorang bisa membaca sekaligus menulis, tidak hanya menulis atau membaca saja. Menulis inipun menulis dalam bentuk dikte, tidak termasuk menulis yang meniru. Begitu pula membaca, membaca yang karena mengenal hurufnya bukan karena menghafalnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Wonogiri, 2018

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	93,88	85,30	89,41
Huruf Lainnya	46,92	41,31	44,00
Melek Huruf	94,48	86,05	90,09
Buta Huruf	5,52	13,95	9,91

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Tabel 3.1 menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Wonogiri tahun 2018 menurut kemampuan membaca dan menulis. Jumlah penduduk Wonogiri umur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis masih cukup besar yaitu 9,91 persen. Yang perlu diperhatikan adalah angka buta huruf wanita (13,95 persen) yang jauh lebih tinggi dari pada laki-laki (5,52 persen).

Tabel 3.2 Angka Melek Huruf Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018

Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
15-24 Tahun	99,26	99,51	99,38
25-44 Tahun	100,00	100,00	100,00
45 Tahun ke Atas	90,12	74,89	82,08

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Bila disajikan menurut umur (Tabel 3.2), terlihat bahwa angka melek huruf terendah dimiliki oleh penduduk berusia 45 tahun ke atas. Hal yang menarik, pada penduduk usia 15-44 tahun angka melek huruf laki-laki dan perempuan masih berimbang, namun pada penduduk usia 45 tahun ke atas, angka melek huruf perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan sebelum tahun 1970-an ada perbedaan perlakuan terhadap pendidikan laki-laki dan perempuan. Hal ini yang diduga mengakibatkan angka buta huruf perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki. Namun saat ini, kesadaran terkait pendidikan tanpa membedakan gender sudah semakin baik.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Tabel 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonogiri, 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Lama Sekolah	6,57	6,68	6,88
Harapan Lama Sekolah	12,43	12,44	12,45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 di Wonogiri sebesar 6,88 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (6,68 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Wonogiri mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 6 SD atau putus sekolah di kelas 7 SMP. Sedangkan harapan lama sekolah sebesar 12,45 tahun 2018. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun ke atas berpeluang bersekolah hingga lulus SMA. Walaupun secara rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas hanya tamat SD, namun, kondisi pendidikan di Kabupaten Wonogiri kedepannya menunjukkan perbaikan dimana harapan sekolah penduduknya sampai lulus SMA.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan menggambarkan tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah sekaligus mencerminkan taraf intelektualitas wilayah yang bersangkutan. Semakin banyak penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi maka semakin tinggi taraf intelektual wilayah tersebut.

Tabel 3. 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	4,46	5,45	14,77	11,67	9,86	8,79
Tidak Tamat SD	14,74	14,82	16,68	22,07	15,76	18,72
SD/MI	34,61	34,07	29,90	28,89	32,15	31,28
SMP/MTs	21,37	21,56	19,56	20,01	20,42	20,73
SM/MA	20,35	17,98	14,83	13,36	17,46	15,50
PT	4,46	6,12	4,27	4,00	4,36	4,98
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2017-2018

Pada tahun 2018, penduduk Wonogiri yang berusia 15 tahun ke atas paling banyak berpendidikan SD/MI (31,28 persen), diikuti SMP/MTs (20,73 persen). Penduduk tidak tamat SD cukup tinggi (18,72 persen), sedangkan lulusan Perguruan Tinggi hanya 4,98 persen. Hal ini menunjukkan Kabupaten Wonogiri masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas dengan pendidikan tinggi di angkatan kerjanya.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Pada tahun 2018, penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SMP ke atas mencapai 45,66 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 37,37 persen. Sebaliknya, penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SD/belum tamat SD/tidak bersekolah lebih rendah dari perempuan (54,34 persen berbanding 62,63 persen).

Tabel 3.5 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding penduduk di perdesaan. Penduduk perkotaan yang berpendidikan SM/MA pada tahun 2018 mencapai 25,20 persen, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 12,34 persen. Demikian pula untuk penduduk berpendidikan tinggi di perkotaan mencapai 13,28 persen, sedangkan di perdesaan hanya 2,28 persen.

Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	7,72	5,53	10,49	9,85	9,86	8,79
Tidak Tamat SD	11,47	13,65	17,02	20,37	15,76	18,72
SD/MI	27,96	24,29	33,38	33,56	32,15	31,28
SMP/MTs	17,17	18,05	21,38	21,60	20,42	20,73
SM/MA	26,39	25,20	14,83	12,34	17,46	15,50
PT	9,29	13,28	2,91	2,28	4,36	4,98
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2017-2018

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan gambaran umum untuk melihat partisipasi sekolah sesuai kelompok usia sekolah tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang diduduki. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, APS penduduk di perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di perdesaan kecuali pada umur 13-15 tahun. Perbedaan mencolok APS pada umur 19-24 tahun penduduk di perkotaan jauh lebih tinggi dengan perdesaan. Hal ini menunjukkan pada rentang usia tersebut ada sekitar 21 persen penduduk di perkotaan yang sedang bersekolah, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 3,8 persen penduduk usia 19-24 yang sedang sekolah, 96,2 persen penduduk sisanya belum pernah sekolah/sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah harus terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau bagi masyarakat.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Kelompok Umur, Jenis Kelamin		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)		(2)	(3)	(4)
7-12	L	100,00	100,00	100,00
	P	100,00	99,04	99,26
	L + P	100,00	99,57	99,67
13-15	L	90,86	100,00	97,17
	P	100,00	100,00	100,00
	L + P	95,99	100,00	98,69
16-18	L	88,19	77,73	80,22
	P	100,00	80,91	83,64
	L + P	92,29	79,31	81,82
19-24	L	30,32	3,48	10,35
	P	12,10	4,15	6,28
	L + P	21,22	3,80	8,36

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan pada usia 13-15 tahun lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Namun pada usia 19-24 tahun, partisipasi sekolah perempuan masih di bawah laki-laki terutama pada pendidikan tinggi. Laki-laki usia 19-24 tahun yang bersekolah ada sekitar 10,35 persen, sedangkan perempuan hanya 6,28 persen.

Berbeda dengan APS, APM (Angka Partisipasi Murni) telah mempertimbangkan jenjang pendidikan yang dijalani. APM diformulasikan sebagai proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

APM umumnya digunakan untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Jika APM mencapai 100 persen artinya semua anak usia sekolah telah bersekolah tepat waktu. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Kelompok Umur, Jenis Kelamin		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)		(2)	(3)	(4)
SD/MI/Paket A	L	97,11	97,87	97,69
	P	97,51	95,81	96,20
	L + P	97,28	96,95	97,03
SMP/MTs/Paket B	L	73,42	82,35	79,59
	P	91,53	86,01	87,91
	L + P	83,59	84,27	84,05
SMA/SMK/MA/Paket C	L	78,68	1,94	71,21
	P	76,19	4,15	74,75
	L + P	77,81	71,69	72,87
Perguruan Tinggi	L	30,32	1,94	9,21
	P	12,10	96,95	6,28
	L + P	21,22	3,01	7,78

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Secara umum, Nilai APM SD sebesar 97,03 persen yang berarti bahwa dari keseluruhan penduduk usia 7-12 tahun, ada 97,03 persen yang tepat bersekolah di jenjang SD, sedangkan sisanya 2,97 persen lainnya bisa jadi masih duduk di bangku TK, sudah masuk SMP atau justru tidak duduk di bangku sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula nilai APM.

Bila dikelompokkan menurut tempat tinggal, terdapat perbedaan cukup besar pada tingkat perguruan tinggi, dimana 21,22 persen di perkotaan, sedangkan di pedesaan hanya 3,01 persen. Hal ini menggambarkan lebih tingginya partisipasi sekolah penduduk perkotaan dibanding pedesaan pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan bila dikaji menurut jenis kelamin, pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, APM perempuan lebih tinggi dari laki-laki, namun untuk SD dan perguruan tinggi, APM laki-laki tetap lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesempatan yang relatif setara dalam mengenyam pendidikan terlebih di perguruan tinggi.

Ketenagakerjaan



Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja yang layak bagi penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yakni penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja serta peningkatan produktivitas bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup dengan layak. Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas)..

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPAK pada 2018 tercatat sebesar 74,99 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 75 orang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan pengangguran), 25 orang sisanya tidak terlibat dalam perekonomian baik sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Angka ini lebih tinggi dibanding 2017 yang mencapai 71,22 persen. Peningkatan TPAK menggambarkan meningkatnya jumlah penduduk yang potensial dalam perekonomian. Bila dilihat menurut tempat tinggal, TPAK di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan, artinya penduduk di pedesaan lebih siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Di pedesaan lapangan pekerjaan yang tersedia cenderung tidak membutuhkan persyaratan khusus dibandingkan perkotaan. Sedangkan di perkotaan, masih banyak penduduk usia kerja yang melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga belum siap memasuki ke dunia kerja.

Sedangkan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Kesenjangan keduanya cukup lebar, TPAK laki-laki sebesar 85,09 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 65,71 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih dibawah laki-laki. Banyak perempuan yang menjadi kelompok bukan angkatan kerja diantaranya mengurus rumahtangga.

TPAK memberikan penjelasan tentang besarnya sumberdaya potensial dalam perekonomian, namun indikator ini belum cukup menyimpulkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Tingginya TPAK yang berasal dari jumlah penduduk bekerja menggambarkan penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang penduduk yang menganggur justru akan menimbulkan persolan tersendiri. Indikator yang mengukur tingkat pengangguran dikenal dengan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka).

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017-2018

Klasifikasi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	65,71	70,72	2,78	2,94
Perdesaan	72,99	76,41	2,27	2,08
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	80,79	85,09	2,95	2,77
Perempuan	62,43	65,71	1,71	1,71
Total	71,22	74,99	2,38	2,28

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri, 2017-2018

TPT Kabupaten Wonogiri tahun 2018 tercatat sebesar 2,28 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 2 sampai 3 orang yang tergolong pengangguran. Pengangguran di sini mencakup mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) ataupun mereka yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Tabel 4.1 juga memberikan informasi bahwa pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Karakteristik tenaga kerja di daerah perkotaan memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan sehingga cenderung memilih dalam mencari pekerjaan. Berbeda dengan daerah perdesaan yang lebih dapat menerima pekerjaan untuk menyambung hidupnya tanpa melihat apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Bila dilihat menurut jenis kelamin, pengangguran laki-laki pada tahun 2018 sebesar 2,77 persen lebih besar dibandingkan dengan perempuan (1,71 persen). Sebab, perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan kurangnya penyerapan tenaga kerja terdidik pada lapangan usaha tersebut. Banyak lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan serta upah/gaji yang diharapkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2017-2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
<= SD	1,67	0,96
SMP	2,98	4,22
SMA	0,58	1,42
SMK	6,25	6,85
Universitas	1,96	0,76
Total	2,38	2,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas 2017-2018

Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk dengan pendidikan SMK sebesar 6,85 di tahun 2018, kemudian disusul pengangguran tingkat SMP sebesar 4,22 persen dan penganggur SMA sebesar 1,42 persen. Sedangkan tingkat pengangguran pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dan universitas terbilang cukup rendah. Tidak terserapnya angkatan kerja lulusan SMK pada pasar tenaga kerja menggambarkan adanya *mismatch* antara jumlah maupun spesifikasi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi),

dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2018

Kelompok Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian (A)	37,30	43,24	16,60	47,17	40,03
Industri (M)	26,77	17,14	24,45	21,71	22,35
Jasa-Jasa (S)	35,93	39,62	58,95	31,13	37,62

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas 2018

Sektor pertanian masih merupakan sektor tumpuan bagi tenaga kerja di Kabupaten Wonogiri baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Tercatat sebanyak 40 persen penduduk Wonogiri bekerja di sektor ini. Sektor jasa juga cukup banyak menyerap tenaga kerja Wonogiri sebesar 37,62 persen. Sedangkan sektor industri hanya menyerap 22,35 persen dari seluruh tenaga kerja di Wonogiri.

Bila dilihat menurut tempat tinggal, terdapat karakteristik yang berbeda antara tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan. Tenaga kerja di perkotaan, hampir 60 persen bekerja di sektor jasa. Sedangkan di perdesaan hampir separuhnya bekerja di sektor pertanian. Luasnya areal pertanian yang tersedia di perdesaan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk perdesaan, sementara lahan di perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar sektor pertanian. Besarnya sektor jasa-jasa di daerah perkotaan juga menunjukkan bahwa sektor ini memang menjadi andalan bagi penduduk perkotaan untuk mencari penghasilan.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tempat Tinggal dan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Wonogiri, 2018

Kelompok Usaha	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	14,41	15,10	15,15	14,60	14,73
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	36,53	21,92	22,69	31,99	29,82
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,46	0,25	3,38	1,56	1,98
Buruh/karyawan/pegawai	27,35	19,68	38,39	19,39	23,83
Pekerja bebas di pertanian	2,81	2,09	1,14	2,88	2,48
Pekerja bebas di nonpertanian	9,02	1,58	6,17	5,43	5,60
Pekerja keluarga/tidak dibayar	6,42	39,39	13,09	24,14	21,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas 2018

Berdasarkan status pekerjaan utama, hampir 30 persen penduduk Wonogiri berusaha dibantu dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, diikuti sebagai buruh karyawan, selanjutnya sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar pada urutan ketiga. Tingginya penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar dan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dengan persentase lebih dari 50 persen ini menandakan besarnya sektor informal di Kabupaten Wonogiri. Sektor informal ini cukup kuat menopang perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja namun biasanya berskala kecil, dimiliki secara perorangan atau keluarga, pendidikan pekerja rendah dan menggunakan teknologi yang relatif sederhana.

Jika dilihat dari status daerah, terdapat perbedaan struktur pekerja menurut status pekerjaan antara perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, sebesar 38,39 persen pekerja berstatus buruh/karyawan. Sedangkan di perdesaan dengan karakteristik masyarakat petani, 31,99 persen berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar dan 24,14 sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 4.4 juga menggambarkan adanya perbedaan status pekerjaan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, penduduk laki-laki di Wonogiri paling banyak berstatus sebagai pengusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, sedangkan hampir 40 persen tenaga kerja perempuan hanya berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

Taraf dan Pola Konsumsi



Konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan dari hasil produksi (barang atau jasa). Sementara, pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, yang dipenuhi dari pendapatannya. Pola konsumsi masyarakat didekati melalui jumlah pengeluaran/konsumsi rumah tangga. Besarnya pengeluaran untuk konsumsi berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh. Sehingga semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka semakin besar pula jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Wonogiri. Selama periode tahun 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat 37,62 persen dari Rp 655.429,- menjadi Rp 901.970,-. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan. Persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 54,38 persen pada tahun 2017 menjadi 51,04 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran non makanan meningkat dari 45,62 persen menjadi 48,96 persen. Peningkatan terbesar pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada pengeluaran untuk

perumahan yang meningkat dari 20,20 persen pada tahun 2017 menjadi 22,07 persen pada tahun 2018.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rupiah)		Persentase	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	356.426	460.363	54,38	51,04
Bukan Makanan	299.004	441.607	45,62	48,96
Perumahan	132.426	199.096	20,20	22,07
Barang dan Jasa	87.827	120.876	13,40	13,40
Pakaian	15.236	21.617	2,32	2,40
Barang Tahan Lama	27.454	56.401	4,19	6,25
Lainnya	36.061	43.616	5,50	4,84
Jumlah	655.429	901.970	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2017-2018

Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kelompok pengeluaran tersebut, diperoleh bahwa 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 386.960 rupiah per kapita per bulan, 40 persen penduduk pengeluaran menengah sebesar 837.779 rupiah per kapita per bulan, sementara rata-rata pengeluaran untuk 20 persen golongan pengeluaran terbesar sebesar 2.056.653 rupiah per kapita per bulan. Terlihat adanya kesenjangan cukup jauh antara 40 persen termiskin dan 20 persen terkaya.

Pada penduduk berpengeluaran 40 persen terendah, pengeluaran makanan jauh lebih besar (61,54 persen) dibandingkan dengan non makanan (38,46 persen), pola yang sama juga terjadi pada penduduk berpendapatan 40 persen di tengah, namun dengan perbandingan pengeluaran makanan dan non makanan yang lebih berimbang. Sementara pada penduduk golongan pendapatan 20 persen atas, pengeluaran non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Hal ini menguatkan teori bahwa semakin tinggi pengeluaran maka kontribusi pengeluaran makanan semakin kecil.

Tabel 5.2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wonogiri, 2018

Kelompok Barang	Kelompok Pengeluaran						Rata-Rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah		40 Persen Tengah		20 Persen Teratas		
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makanan	238.136	61,54	494.713	59,05	834.674	40,58	460.363
Non Makanan	148.824	38,46	343.066	40,95	1.221.978	59,42	441.607
Jumlah	386.960	100,00	837.779	100,00	2.056.653	100,00	901.970

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Konsumsi Kalori dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.3 Rata-rata Pengeluaran Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wonogiri, 2018

Jenis Konsumsi	Kelompok Pengeluaran			Rata-Rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalori (kkal)	1.759,61	2.379,31	2.708,73	2.197,82
Protein (gram)	46,46	65,61	81,25	61,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Pada tahun 2018, rata-rata konsumsi kalori penduduk Wonogiri sebesar 2.197,82 kkal per hari. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk Wonogiri di tahun 2018 sudah memenuhi syarat

kecukupan gizi yang ditentukan. Demikian pula, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Wonogiri sebesar 61,09 gram telah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

Namun, tampaknya kecukupan gizi tersebut tidak dialami oleh seluruh lapisan masyarakat Wonogiri. Penduduk 40 persen termiskin di Kabupaten Wonogiri belum mencukupi kecukupan gizi baik jumlah konsumsi kalori maupun protein per harinya. Rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk 40 persen terbawah Kabupaten Wonogiri hanya sebesar 1.759,61 kkal, sedangkan konsumsi protein sebesar 46,46 gram per hari.

Tabel 5.4 Rata-rata Pengeluaran Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Tempat Tinggal di Kabupaten Wonogiri, 2018

Jenis Konsumsi	Tempat Tinggal		Rata-Rata Pengeluaran
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalori (kkal)	2.368,66	2.139,53	2.197,82
Protein (gram)	68,80	58,46	61,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan. Pada tahun 2018, rata-rata penduduk perkotaan per hari mengkonsumsi kalori 2.368,66 kkal dan protein sebanyak 68,80 gram sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengkonsumsi mengkonsumsi kalori 2.139,53 kkal dan protein sebanyak 58,46 gram.

Perumahan dan Lingkungan



Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah kondisi perumahan yang dimiliki oleh penduduk. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang yang harus dipenuhi untuk terus bertahan hidup. Saat ini, keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi sudah menjadi gaya hidup dan simbol status bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah serta fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas dilihat dari jenis lantai terluas, atap dan dinding. Sedangkan fasilitas dilihat dari sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga dan sumber penerangan.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki atap, lantai dan dinding. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Persentase rumah tangga menurut indikator kualitas perumahan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2018

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah (%)	91,54	91,96	94,05
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	100,00	100,00	99,79
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	95,88	95,02	96,86
Luas lantai per kapita ≥ 10 m ²	98,97	98,53	98,53

Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018

Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, dari 91,54 persen tahun 2016 menjadi 94,05 tahun 2018. Demikian pula kualitas rumah tinggal jika ditinjau dari jenis dinding terluas menunjukkan potret yang sama, yaitu rumah tangga dengan kualitas rumah berdinding tembok dan kayu menunjukkan tren peningkatan. Untuk indikator atap, terdapat 99,79 persen beratap layak (rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes) pada tahun 2018 dan bahkan 100 persen di tahun 2016-2017.

Kualitas rumah tinggal juga diperoleh dari luas lantai rumah yang dihuni. Luas lantai rumah dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi penghuninya. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Organization (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi. Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO tersebut, lebih dari 98 persen rumah tangga di Wonogiri memiliki rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 10 meter persegi.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal diantaranya tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada 2018, rumah tangga di Wonogiri yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, air leding, sumur bor dan sumur terlindung sebagai sumber air minum mencapai 65,45 persen. Sisanya mengkonsumsi air dari mata air baik terlindung/tidak, sumur tidak terlindung, air hujan, air permukaan lainnya. Tabel 6.2 juga menunjukkan bahwa rumah tangga di Wonogiri yang mempunyai fasilitas jamban sendiri pada 2018 mencapai 91,89 persen dan sebanyak 87,46 persen telah memakai tangki septik.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016-2018

Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng, sumur bor, sumur terlindung	62,02	62,36	65,45
Jamban sendiri	91,80	92,13	91,89
Jamban sendiri dengan tangki septik	75,05	82,28	87,46
Sumber penerangan listrik	99,61	100,00	99,90

Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik yang dihasilkan lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hampir 100 persen rumah tangga di Wonogiri telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Pengusahaan Bangunan Tempat Tinggal, 2016-2018

Status Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	97,02	94,91	95,56
Kontrak/Sewa	0,33	1,05	0,54
Bebas Sewa	2,37	3,64	3,54
Dinas/Lainnya	0,28	0,40	0,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 95,56 persen, sisanya 4,44 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 0,54 persen kontrak/sewa, bebas sewa 3,54 persen, dan lainnya 0,36 persen.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

Kemiskinan



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) tersebut merupakan batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Garis Kemiskinan terdiri dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Wonogiri mengalami peningkatan selama tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016, garis kemiskinan di Wonogiri sebesar Rp. 275.507,- kemudian meningkat menjadi Rp. 284.710,- pada tahun 2017 hingga menjadi Rp. 293.357, - pada tahun 2018. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Penduduk miskin di Wonogiri menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2018. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 124,83 ribu jiwa atau 13,12 persen dari jumlah seluruh penduduk Wonogiri. Berbagai upaya Pemerintah terus dilakukan guna menekan angka kemiskinan sehingga pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sudah berkurang menjadi 123,04 ribu jiwa atau 12,90 persen dari jumlah penduduk, hingga pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menjadi 102,84 ribu jiwa atau 10,75 persen dari jumlah penduduk Wonogiri.

Tabel 7.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Wonogiri, 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	124,83	123,04	102,84
Persentase Penduduk Miskin	13,12	12,90	10,75
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	1,68	1,80	1,71
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	0,38	0,43	0,41
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	275.507	284.710	293.357

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Susenas 2016-2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁), Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, diantaranya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁), Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂). Indeks Kedalaman Kemiskinan menjelaskan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P₂). Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode 2016–2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) sebesar 1,68 pada 2016 meningkat menjadi 1,80 di tahun 2017, dan turun kembali menjadi 1,71 pada 2018. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂), dimana pada 2016 tercatat sebesar 0,38 meningkat menjadi 0,43 persen pada 2017 dan turun kembali menjadi 0,41 pada 2018. Walaupun

tingkat kemiskinan tahun 2017 menurun namun kondisi kemiskinan perlu diwaspadai karena terjadi kenaikan nilai kedua indeks P_1 maupun P_2 . Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut persentase penduduk miskin turun namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

<https://wonogirikab.bps.go.id>



Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang saat ini mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: penggunaan media teknologi informasi seperti telepon, telepon seluler, komputer dan internet, serta persentase rumah tangga yang mendapatkan perlindungan sosial.

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sekarang ini sangat terlihat jelas pada peningkatan kepemilikan alat komunikasi seperti telepon, telepon seluler, dan komputer serta semakin meluasnya penggunaan internet dan media sosial.

Tabel 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	59,26	49,23	24,09
40 Persen Tengah	68,80	60,79	29,06
20 Persen Teratas	88,14	81,51	54,53
Pendidikan Tertinggi			
SD ke bawah	52,52	41,12	12,92
SMP ke atas	95,16	91,21	63,06
Jumlah	68,99	60,47	32,29

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi tahun 2018, terdapat 68,99 persen penduduk Wonogiri yang memiliki akses teknologi informasi baik HP, PC, desktop, laptop, notebook maupun tablet. Perkembangan teknologi informasi berkembang pesat terbukti dengan persentase kepemilikan HP di Kabupaten Wonogiri yang mencapai 60,47 persen. Masyarakat yang cenderung memilih telepon seluler

karena praktis dapat dibawa kemana-mana, lebih bersifat pribadi, tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Sejalan dengan penggunaan perangkat teknologi informasi, penggunaan internet termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp pada tahun 2018 sebesar 32,29 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran maupun tingkat pendidikan, semakin besar tingkat pendapatan atau semakin tinggi tingkat pendidikan, akses teknologi informasi maupun kepemilikan perangkatnya semakin tinggi pula.

Penerima Jaminan Sosial

Perhatian pemerintah terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dari berbagai program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tabel 8.2 menggambarkan persentase rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial di Kabupaten Wonogiri. Diantaranya persentase rumah tangga penerima Raskin/Rastra/BPNT sebesar 43,40 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 13,77 persen, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 14,01 persen, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10,76 persen

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2018

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Raskin/Rastra/BPNT	43,40
Program Indonesia Pintar (PIP)	13,77
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	14,01
Program Keluarga Harapan (PKH)	10,76

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri, 2018

Kesimpulan



Kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai aspek dimensi kehidupan yang kompleks dan luas. Berbagai konsep dan ukuran telah dikembangkan guna mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di suatu wilayah. Publikasi ini membahas aspek kesejahteraan berdasarkan data dan indikator yang telah terukur serta memenuhi aspek keterbandingan antar waktu maupun wilayah. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Wonogiri antara lain :

1. Di bidang kependudukan, laju pertumbuhan penduduk cukup terkendali dan menunjukkan tren penurunan selama 5 tahun terakhir. Struktur penduduk Wonogiri didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun), dengan Angka Beban Ketergantungan penduduk sebesar 51,49 persen.
2. Di bidang kesehatan
 - a. Kondisi derajat dan status kesehatan penduduk Wonogiri menunjukkan perbaikan diiringi dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup dan menurunnya angka kesakitan penduduk.
 - b. Pemanfaatan fasilitas kesehatan cukup baik. Penolong persalinan terakhir seluruhnya melalui tenaga medis baik dokter kandungan maupun bidan. Praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu merupakan fasilitas kesehatan yang paling banyak didatangi saat berobat jalan.
3. Di bidang pendidikan
 - a. Angka buta huruf yang masih tinggi (9,91 persen).
 - b. Masih ada kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH), di mana AMH laki-laki (94,48 persen) lebih tinggi dari AMH perempuan (86,05 persen).
 - c. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 25 tahun ke atas sebesar 6,88 tahun atau tamat SD, namun kondisi pendidikan kedepannya menunjukkan perbaikan dengan harapan lama sekolah mencapai 12,45 tahun (lulus SMA).
 - d. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat kesenjangan tingkat pendidikan maupun partisipasi sekolah antara penduduk di perkotaan dan perdesaan serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

4. Di bidang ketenagakerjaan
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah cukup rendah. Namun, penganggur tertinggi berasal dari lulusan SMK.
 - b. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor tumpuan bagi penduduk di pedesaan, sedangkan daerah perkotaan didominasi oleh sektor jasa-jasa.
 - c. Berdasarkan status pekerjaan utama, hampir 30 persen penduduk Wonogiri berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, diikuti sebagai buruh karyawan, selanjutnya sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar pada urutan ketiga.
5. Pola konsumsi
 - a. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami peningkatan serta disertai dengan penurunan persentase pengeluaran untuk makanan.
 - b. Secara umum, konsumsi kalori dan protein per hari sudah memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Namun, kecukupan gizi tersebut tidak dialami oleh seluruh lapisan masyarakat Wonogiri. Penduduk 40 persen termiskin di Kabupaten Wonogiri belum mencukupi kecukupan gizi baik jumlah konsumsi kalori maupun protein per harinya.
6. Membbaiknya pendapatan penduduk berdampak pula pada membbaiknya kualitas dan fasilitas perumahan. Kualitas rumah yang baik diantaranya ditandai dengan tingginya persentase rumah dengan lantai bukan tanah, penggunaan atap beton maupun genteng, penggunaan dinding tembok dan kayu serta luas rumah per kapita di atas 10 m². Penggunaan fasilitas rumah diantaranya penggunaan air bersih, jamban sendiri serta sumber penerangan listrik.
7. Tingkat kemiskinan serta jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonogiri menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir. Namun yang harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih cenderung fluktuatif.
8. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sangat terlihat jelas pada besarnya akses dan kepemilikan alat komunikasi seperti telepon, telepon seluler, dan komputer serta semakin meluasnya penggunaan internet. Semakin besar tingkat pendapatan atau semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula akses teknologi informasi maupun kepemilikan perangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2005. *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2020*. Jakarta.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2018. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2017*. Wonogiri.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018*. Wonogiri.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2018. *Statistik Ketenagakerjaan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2017*. Wonogiri.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2019. *Statistik Ketenagakerjaan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018*. Wonogiri.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2019. *Wonogiri Dalam Angka 2019*. Wonogiri.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2017*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017. *Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2016*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2017*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. *Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2017*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017*. Semarang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2018*. Semarang.